



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 19/01/2025
 Reviewed : 22/01/2025
 Accepted : 21/01/2025
 Published : 28/01/2025

Maria Diana Dame¹
 Andreas Rengga²
 Nunsio Handrian
 Meylano³

ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAERAH UNTUK MENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BAPPERIDA

Abstrak

Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas dimana ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi hanya terbatas pada teori dan praktek dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya yang dimilikinya, seperti pajak daerah dan retribusi, guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.

Kata kunci: Kapasitas; Fisikal; BAPPERIDA

Abstract

Education carried out in higher education is still limited where the knowledge obtained in higher education is only limited to theory and practice on a small scale with limited intensity. Data analysis in qualitative research is carried out at the time of data collection, and after the completion of data collection in a certain period. At the time of the interview, the researcher had analyzed the answers interviewed. Regional fiscal capacity is the financial ability of a region to optimize revenue obtained from its resources, such as regional taxes and levies, in order to finance government activities and regional development.

Keywords: Capacity; Physical; BAPPERIDA

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (dalam Indonesia, 2006) tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan prestasi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas dimana ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi hanya terbatas pada teori dan praktek dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas. Dalam rangka menunjang aspek pendidikan di perguruan tinggi yang profesional dan siap bersaing dalam dunia kerja, maka sistem pendidikan Perguruan Tinggi Indonesia mengalami transformasi yang fundamental sejak diluncurkannya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di pasar kerja global.

Kebijakan Kurikulum Kampus Merdeka menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam maupun di luar program studi. Program yang ditawarkan yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar disatuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Dalam implementasinya, MBKM menuntut perguruan tinggi untuk berkolaborasi secara aktif dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk

^{1,2,3)} Universitas Nusa Nipa
 email: mariadianadame@gmail.com

memiliki keterampilan seperti kepemimpinan, kemampuan berbahasa asing, serta literasi teknologi yang diperlukan dalam era digital saat ini. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pengalaman ini, diharapkan lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang mumpuni, sehingga siap menghadapi tantangan dan dinamika dunia kerja yang terus berubah.

Menyikapi kebijakan Kemendikbud terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Nusa Nipa oleh masing-masing prodi mulai menerapkan program MBKM. Salah satunya yakni Program Studi Manajemen yang dimana mengambil keputusan untuk menerapkan program magang sebagai program MBKM agar mahasiswa bisa menjadi tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja setelah menyelesaikan program magang dimaksud.

Magang/*internship* dalam kamus Bahasa Indonesia adalah calon pegawai (belum diangkat secara tetap dan belum menerima gaji/upah karena dianggap masih dalam tahap belajar). Sedangkan menurut *American Dictionary*, *internship is a period of time spent receiving or completing training at a job as a part of becoming qualified to do it* (satu periode waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pelatihan pada sebuah pekerjaan sebagai bagian untuk menjadi tenaga yang berkualifikasi untuk melakukannya).

Menurut *Cambridge Dictionary*, *internship is a period of time during which someone works for a company or organization in order to get experience of a particular type of work* (satu periode waktu dimana seseorang bekerja pada sebuah instansi atau perusahaan untuk mendapatkan pengalaman dalam suatu jenis pekerjaan). (Universitas Tirtayasa, 2020).

Magang kerja ini merupakan suatu kegiatan praktek bagi mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja, yang nantinya digunakan untuk pengembangan kapasitas dan salah satu pilihan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir pelaksanaan akademik pada perguruan tinggi Universitas Nusa Nipa Maumere. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Dalam pelaksanaan tugasnya BAPPERIDA menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah Daerah.

1. Perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi di daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi di daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi di daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi di daerah.
5. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
6. Pengordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perumusan dan penyusunan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
8. Pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
9. Perumusan dan penyusunan rencana riset dan inovasi di daerah.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Pada Kebijakan Merdeka Belajar Kampus-Merdeka penulis melaksanakan program magang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD). Bidang PPEPD mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, data dan pelaporan pembangunan daerah, Bidang PPEPD menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyusunan perencanaan, program, anggaran dan sumber daya kerja bidang.
2. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah

3. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan
4. Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah.
5. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah
6. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah.
7. Mengordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah
8. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah
9. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah
10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan
11. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah
13. Pengelolaan dan penyusunan hasil analisis dan evaluasi untuk pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah
14. Pengordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
15. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah
16. Pengordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Secara operasional, salah satu tugas utama Bapperida dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Sikka, adalah pelaksanaan tugas bidang PPEPD. Tugas ini terus dilakukan setiap tahun untuk menghasilkan perbaikan. Pembangunan adalah proses perubahan yang melibatkan seluruh struktur sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, institusi, dan budaya. Menurut frasa perubahan, pembangunan adalah kumpulan tindakan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan atau kesejahteraan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bagian kedua pasal 260 tentang Pembangunan Daerah, pembangunan daerah adalah subsistem dari pembangunan nasional, merupakan serangkaian tindakan pemerintah daerah bersama semua elemen di dalam masyarakat untuk mencapai kemajuan berupa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan sinergitas pembangunan daerah dan pembangunan nasional harus terjadi untuk menjamin terciptanya hubungan simetris yang saling menguntungkan.

Untuk merencanakan pembangunan di Kabupaten Sikka, perlu diperhitungkan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Potensi dan sumber daya yang dimiliki harus dikelola seefektif mungkin untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Adapun sumber pendapatan atau kemampuan keuangan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer/dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hal ini sangat mempengaruhi penentuan skala prioritas pelaksanaan program pembangunan. Maka dari itu, penulis melakukan identifikasi dan analisis hubungan antara kemampuan keuangan perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sikka

METODE PENELITIAN

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Kegiatan magang kerja dijalankan selama kurang lebih tiga bulan terhitung mulai dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan 12 Desember 2024.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*”. (Moleong, 2002: 103). langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (moleong, 2002:103).

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian rinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian di lapangan. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong- golongkan data untuk membentuk transkrip penelitian, untuk membuat fokus data yang diperlukan dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung terus- menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis (meleong : 2002 : 103).

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (menyajikan data). Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari hasil reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam analisis, setelah ada data tersebut direduksi dan disajikan (meleong : 2002 : 103)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), khususnya di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD). Kegiatan yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, khususnya di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu :

1. Membuat susunan perolehan pencapaian dari beberapa indikator ada pada siperindu untuk provinsi dan kabupaten
2. Mengikuti acara serah terima jabatan dan pelaporan kegiatan yang ada di masing-masing bidang
3. Pembuatan program kebijakan pemerintah berdasarkan hasil data rekomendasi yang telah dibuat
4. Pertemuan penyusunan profil Kabupaten Sikka bersama kepala bidang PPEPD dan staff
5. Menulis nomor surat SPT dan SPPD pegawai Bapperida
6. Membantu melengkapi berkas-berkas yang masih memiliki catatan seperti belum di stempel, nomor SPPD, dan nomor SPT
7. Membantu penginputan data BG dan SG rekapan
8. Mengikuti zoom dibidang PPEPD bersama dengan bidang PA II Provinsi NTT
9. Melakukan penginputan data realisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2024

10. Membantu memeriksa data-data yang masih kurang dan mengisi data yang masih kurang tersebut untuk program rancangan APBD tahun 2025
11. Membantu penginputan data SPPD
12. Membantu mengganti penginputan data pada proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan kemampuan keuangan daerah dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029
13. Membantu menginput data rekapan DAK Fisik Kabupaten Sikka tahun 2019-2024
14. Diskusi persiapan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
15. Mengikuti zoom meeting skala NTT terkait KEM-PPKF
16. Mengikuti zoom meeting mengenai asistensi penggunaan modul informasi pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
17. Mengikuti live streaming bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah
18. Mengantar surat SPT dan SPPD untuk ditanda tangani oleh Bapak Plt Bapperida
19. Perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan Mego
20. Perjalanan dinas ke Kecamatan Doreng
21. Perjalanan dinas ke Kecamatan Tanawawo
22. Mengikuti pertemuan mengenai penyusunan Ranperbup
23. Membantu mengisi tambahan indikator untuk dokumen RPJMD
24. Membantu menyusun SPT dan SPPD sesuai dengan nomor surat
25. Mengikuti rapat mengenai DAK Fisik bersama dinas Kesehatan, PKO, PUPR, Perpustakaan dan PU
26. Kunjungan DPK ke kantor Bapperida
27. Pembuatan laporan perjalanan dinas
28. Membantu melengkapi SPT dan SPPD yang masih kurang
29. Pertemuan intern dalam bidang PPEPD mengenai realisasi anggaran bidang PPEPD
30. Mengikuti zoom meeting sosialisasi peningkatan keamanan sistem informasi KRISNA
31. Membantu mengisi jadwal lembur RPJPD bulan September
32. Mengikuti rapat evaluasi RKPD Kabupaten Sikka Triwulan III bersama PJ Bupati Sikka dan semua perangkat daerah di Kabupaten Sikka
33. Mengikuti rapat evaluasi Triwulan II bersama PJ Bupati Sikka dan seluruh perangkat daerah di kantor bupati Sikka
34. Membantu menulis nomor surat SPPD
35. Membantu mengisi data indikasi rencana program urusan yang disertai kebutuhan pendanaan
36. Mengikuti rapat intern pada bidang PPEPD bersama kepala bidang dan pegawai bidang PPEPD
37. Membantu menginput data indikator pembangunan
38. Mengikuti zoom meeting rapat koordinasi bersama menteri dalam negeri dan menteri ketenagakerjaan
39. Membantu mengecek kelengkapan dokumen perjalanan dinas
40. Membantu mengecek dan melengkapi SPPD dan SPT
41. Membantu mencap dan memeriksa surat perintah tugas untuk menjalankan lembur
42. Mengikuti rapat intern dalam bidang PPEPD
43. Kunjungan ke posko Waigete
44. Briefing bersama kepala bidang PPEPD
45. Membantu menyiapkan daftar hadir
46. Mengikuti kegiatan asistensi
47. Membantu menginput data dalam dokumen evaluasi triwulan III dan renstra menjadi satu dokumen untuk masing-masing perangkat daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana kapasitas fiskal daerah yang fluktuasi dapat menunjang perencanaan pembangunan.

Fluktuasi kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Kapasitas fiskal yang dimaksud mencakup kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup,

guna membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, baik dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber lain seperti hibah dan pinjaman. Fluktuasi kapasitas fiskal sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi nasional dan global, serta kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ketika pendapatan daerah menurun, akibatnya adalah penurunan pajak atau pendapatan lainnya, yang mana perencanaan pembangunan menjadi terhambat karena terbatasnya anggaran yang tersedia untuk berbagai proyek penting, seperti infrastruktur dan layanan publik.

Dalam menghadapi fluktuasi kapasitas fiskal, pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang fleksibel dan adaptif dalam perencanaan pembangunan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan merumuskan kebijakan anggaran yang realistis dan berbasis pada proyeksi pendapatan yang lebih stabil. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan, seperti memperkuat sektor pajak daerah dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang bersifat fluktuatif.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan penataan prioritas pembangunan, dengan memastikan bahwa proyek-proyek yang mendesak dan berkelanjutan tetap mendapatkan pembiayaan meskipun dalam kondisi fluktuasi fiskal. Strategi-strategi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berjalan meskipun dalam kondisi ketidakpastian ekonomi.

Ada beberapa point yang diwawancarai terkait dengan kapasitas fiskal daerah untuk menunjang perencanaan pembangunan sebagai berikut :

Kapasitas Fiskal Daerah

1. Bagaimana fluktuasi kapasitas fiskal daerah berpengaruh terhadap prioritas dan alokasi anggaran dalam perencanaan pembangunan di daerah ini ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

a) Menurut bapak kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) menyatakan bahwa, *fluktuasi kapasitas fiskal daerah dapat secara langsung mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran, dapat dilihat dengan melakukan kajian prioritas pembangunan terhadap pembiayaan atau fiskal yang berpengaruh karena ketika kajian ini tidak mendapatkan keputusan yang strategis maka tidak adanya sinergi antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran.*

Selain itu, dapat dilihat juga dengan menjaga stabilitas keuangan dengan intensifikasi dan ekstentifikasi sumber pendapatan yang mana ketika itentifikasi dan ekstentifikasi sumber pendapatan dikelola secara buruk, maka stabilitas keuangan tidak dapat dimaksimalkan untuk perencanaan pembangunan.

b) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *fluktuasi kapasitas fiskal daerah sangat berpengaruh karena daerah masih bergantung terhadap transfer dana dari pusat. Apabila transfer menurun akan berpengaruh kepada perencanaan pembangunan di Kabupaten dalam bentuk program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat akomodir semuanya.*

c) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *fluktuasi kapasitas fiskal daerah berpengaruh ketika dana transfer dari pusat berkurang, maka berpengaruh terhadap prioritas anggaran terhadap tahun berikutnya yang akan disusun rencananya.*

Berdasarkan jawaban dari ketiga responden diatas dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kapasitas fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan daerah. Menurut Bapak Hilarius Rangga Mesa, hal ini dapat memengaruhi prioritas pembangunan, terutama jika tidak ada kajian strategis yang mengintegrasikan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan anggaran, serta pengelolaan stabilitas keuangan yang tidak optimal.

Fungsional perencana menambahkan bahwa ketergantungan daerah pada transfer dana dari pusat membuat penurunan transfer berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk mengakomodasi program dan kegiatan pembangunan. Hal ini diperkuat oleh pendapat fungsional perencana lain, yang menyatakan bahwa penurunan transfer dana dari pusat memengaruhi prioritas anggaran untuk tahun berikutnya, sehingga berdampak pada perencanaan pembangunan yang disusun.

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam kapasitas fiskal daerah, baik secara internal maupun eksternal ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

a) Menurut bapak kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) menyatakan bahwa, *fluktuasi kapasitas fiskal daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :*

1) *Faktor Internal*

- a. *Potensi pendapatan yang hilang akibat regulasi, hal ini mengacu pada pendapatan yang seharusnya bisa diperoleh pemerintah daerah tetapi tidak terealisasi karena adanya aturan, kebijakan atau regulasi tertentu yang menghambat pengumpulan atau optimalisasi pendapatan.*
- b. *Kemampuan perangkat daerah dalam mengelola pendapatan, ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan perangkat daerah dalam mengelola pendapatan baik pajak maupun retribusi yang merujuk pada kapasitas dan pendapatan pemerintah dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.*
- c. *Regulasi pendapatan yang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, hal ini merujuk pada aturan-aturan yang mengatur sumber pendapatan daerah, tetapi sudah tidak sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial, atau, kebutuhan pembangunan yang ada.*

2) *Faktor Eksternal*

- a. *Adanya pengaruh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pengelolaan pendapatan, dimana daerah harus mematuhi aturan-aturan tersebut sambil mencari inovasi untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui PAD.*
- b. *Kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang semakin menurun, karena pajak dan retribusi adalah sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).*
- c. *Perubahan regulasi pengelolaan pendapatan daerah, ini mengacu pada penyesuaian aturan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, provinsi atau daerah untuk mengatur sumber dan mekanisme pengelolaan pendapatan oleh pemerintah daerah.*
- d. *Pengaruh akibat bencana alam yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan pendapatan.*

b) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam kapasitas fiskal daerah yaitu:*

1) *Faktor Internal*

- a. *Kebijakan Pemerintah*
Kebijakan pemerintah, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran, memainkan peran penting sebagai faktor internal yang dapat memicu fluktuasi kapasitas fiskal daerah
- b. *Inflasi*
Inflasi merujuk pada dampak kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran.

2) *Faktor Eksternal*

- a. *Pandemi Covid-19*
 - b. *Kondisi ekonomi global*
Kondisi ekonomi global memengaruhi kapasitas fiskal daerah melalui fluktuasi pendapatan dari SDA, perubahan nilai tukar, dampak krisis global, dan dinamika kebijakan internasional.
 - c. *Faktor musiman (Sektor pertanian, pariwisata), merujuk pada perubahan yang terjadi secara periodik dalam suatu tahun, yang dapat memengaruhi pendapatan dan pengeluaran daerah, terutama di sektor-sektor yang sangat dipengaruhi oleh musim atau waktu tertentu.*
- c) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam kapasitas fiskal daerah yaitu faktor internal dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai target dan faktor eksternal dimana transfer dari pusat berkurang atau sudah ada prioritasnya.*

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kapasitas fiskal daerah disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi potensi pendapatan yang hilang akibat regulasi yang menghambat optimalisasi pendapatan, kemampuan perangkat daerah dalam mengelola pendapatan, dan ketidaksesuaian regulasi pendapatan dengan kondisi saat ini.

Selain itu, kebijakan pemerintah dan inflasi juga turut berperan dalam mempengaruhi fluktuasi fiskal daerah. Faktor eksternal yang memengaruhi antara lain kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait pengelolaan pendapatan, kepatuhan wajib pajak yang menurun, perubahan regulasi pengelolaan pendapatan, serta dampak bencana alam. Pandemi COVID-19, kondisi ekonomi global, dan faktor musiman pada sektor pertanian dan pariwisata juga menjadi penyebab signifikan fluktuasi kapasitas fiskal daerah. Fluktuasi ini juga terjadi akibat ketidakpastian pendapatan daerah dan berkurangnya dana transfer dari pusat.

3. Apa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah terkait dengan perencanaan pembangunan ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

a. Menurut kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) menyatakan bahwa, *ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah seperti :*

1) *Pertumbuhan ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi adalah kunci pembangunan suatu negara atau daerah. Biasanya pertumbuhan ekonomi diukur melalui kenaikan produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB)

2) *Kontribusi PDRB*

Kontribusi PDRB biasanya mengacu pada besarnya sumbangan sektor-sektor ekonomi terhadap total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu. Kontribusi PDRB diukur dengan membagi nilai tambah sektor tersebut dengan total PDRB, lalu dikalikan 100 %

3) *Gini Ratio*

Gini ratio adalah ketimpangan pembangunan antar daerah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi

b. Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah adalah terlaksananya semua program dan sub program yang direncanakan*

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah meliputi beberapa aspek penting. Bapak kabid, menyebutkan bahwa indikatornya antara lain pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui kenaikan PDRB atau PDB, kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, serta Gini ratio yang menunjukkan ketimpangan pembangunan antar daerah.

Sementara itu, fungsional perencana menambahkan bahwa keberhasilan juga dapat diukur dari terlaksananya seluruh program dan sub-program yang direncanakan, yang menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan fiskal daerah.

4. Apa langkah yang diambil oleh pemerintah daerah khususnya Bapperida dalam konteks perencanaan untuk mengurangi fluktuasi kapasitas fiskal daerah agar lebih stabil dan dapat mendukung perencanaan pembangunan ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

a) Menurut bapak kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) mengatakan bahwa, *ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi fluktuasi kapasitas fiskal daerah agar lebih stabil dan mendukung perencanaan pembangunan yaitu penyusunan dan penetapan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, mengoptimalkan semua potensi pendapatan daerah, dan meningkatkan kapasitas operator dalam pengelolaan pendapatan daerah.*

b) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi fluktuasi kapasitas fiskal agar lebih stabil dan mendukung perencanaan pembangunan adalah tidak memaksakan melaksanakan program kegiatan*

dan sub kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, ada anggaran yang di drop dimana kebutuhannya tidak mendesak atau prioritas.

- c) Menurut bapak Saverinus Sawe Keupung, S.E, selaku fungsional perencana menyatakan bahwa, *langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi fluktuasi kapasitas fiskal agar lebih stabil dan mendukung perencanaan pembangunan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mencari sumber-sumber pendanaan lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).*

Berdasarkan jawaban dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi fluktuasi kapasitas fiskal daerah agar lebih stabil dan mendukung perencanaan pembangunan. Bapak kabid menyebutkan langkah-langkah seperti penyusunan dan penetapan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan.

Fungsional perencana, menambahkan bahwa langkah lain termasuk tidak memaksakan pelaksanaan program atau kegiatan yang tidak mendesak, serta penyesuaian anggaran untuk prioritas yang lebih urgent. Sementara itu, fungsional perencana lain, menyarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencari sumber pendanaan lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

5. Apa kebijakan atau strategi yang diterapkan untuk memitigasi dampak fluktuasi kapasitas fiskal daerah terhadap anggaran pembangunan daerah ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

- a) Menurut bapak kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) mengatakan bahwa, *terdapat strategi yang diterapkan untuk memitigasi dampak fluktuasi kapasitas fiskal daerah seperti penerimaan pendapatan melalui aplikasi, menghitung kembali potensi pendapatan yang tersedia dan menertipkan pengelolaan pendapatan dengan cara penertipan SPPT pajak dan retribusi daerah*
- b) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *ada kebijakan atau strategi yang diterapkan untuk memitigasi dampak fluktuasi kapasitas fiskal daerah yaitu dengan mengurangi jumlah program kegiatan dan sub kegiatan.*
- c) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *kebijakan atau strategi yang diterapkan untuk memitigasi dampak fluktuasi kapasitas fiskal daerah adalah merasionalisasikan belanja daerah. Misalnya, ketika dana mengalami defisit yang besar maka dana tersebut harus dirasionalisasikan.*

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa bapak kabid, menjelaskan strategi yang diterapkan meliputi penerimaan pendapatan melalui aplikasi, perhitungan ulang potensi pendapatan, dan penertiban pengelolaan pendapatan, seperti penertiban SPPT pajak dan retribusi daerah.

Fungsional perencana, menyarankan untuk mengurangi jumlah program kegiatan dan sub-kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu, fungsi perencana lain menambahkan strategi berupa rasionalisasi belanja daerah, yang dilakukan terutama ketika terjadi defisit anggaran besar.

Perencanaan Pembangunan

1. Apakah ada mekanisme monitoring untuk memastikan anggaran pembangunan digunakan sesuai rencana ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

- a) Menurut bapak kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) mengatakan bahwa, *ya, ada mekanisme monitoring yang dilakukan Bapperida yaitu evaluasi terhadap kinerja pendapatan yang dimana evaluasi tersebut dilakukan selama empat kali dalam satu tahun atau menggunakan sistem triwulan.*
- b) Menurut fungsional perencana mengatakan bahwa, *ya, ada mekanisme monitoring yang dilakukan Bapperida yaitu monitoring evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP), dan dana dekonsentrasi. Selain itu juga dilakukan survei RKPD.*
- c) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *ya, ada mekanisme monitoring yang dilakukan Bapperida yaitu dengan melakukan survei RKPD.*

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Mekanisme monitoring, Baperida memiliki mekanisme monitoring yang terstruktur secara berkala. Hal ini mencakup evaluasi kinerja pendapatan yang dilaksanakan empat kali dalam setahun, dengan sistem triwulan.
- 2) Program dan sumber dana, monitoring tidak hanya terbatas pada kinerja pendapatan, tetapi juga mencakup evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP), serta dana dekonsentrasi. Survei Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan bagian dari proses monitoring ini.
- 3) Survei RKPD, selain evaluasi kinerja dan program, survei RKPD menjadi metode penting dalam monitoring untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Baperida menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam monitoring, melibatkan berbagai sumber dana dan metode evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

2. Bagaimana kapasitas fiskal daerah mempengaruhi penyusunan perencanaan seperti RPJMD dan RPJPD ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

- a) Menurut bapak kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) mengatakan bahwa, *penyusunan perencanaan seperti RPJMD dan RPJPD dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah ketika proyeksi kapasitas fiskal daerah disesuaikan dan dilakukan dengan perhitungan yang cermat.*
- b) Menurut fungsional perencana mengatakan bahwa, *kapasitas fiskal daerah mempengaruhi penyusunan RPJMD dan RPJPD yaitu biasanya ada perhitungan dari dana sekarang untuk perencanaan tiap tahun yang mana tiap tahunnya dana tersebut di hitung 3%*
- c) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *kapasitas fiskal daerah mempengaruhi penyusunan RPJMD dan RPJPD yaitu masih menggunakan capaian kinerja dan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dari situ ketika dimasukan kedalam dokumen RPJMD dan RPJPD baru diketahui bahwa capaian kinerja belum mencapai target karena adanya pengaruh dari kapasitas fiskal tersebut*

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RPJPD. Menurut bapak kabid, proyeksi kapasitas fiskal harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat untuk menyusun perencanaan tersebut.

Fungsional perencana menambahkan bahwa kapasitas fiskal dihitung berdasarkan dana saat ini dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sekitar 3%. Fungsional erencana lain menyatakan bahwa kapasitas fiskal memengaruhi capaian kinerja, yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam dokumen perencanaan sering terlihat target belum tercapai karena keterbatasan kapasitas fiskal.

3. Apakah ada program prioritas yang terdampak ketika kapasitas fiskal menurun ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

- a) Menurut bapak kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) mengatakan bahwa, *ada program prioritas yang terdampak ketika kapasitas menurun yaitu program pengelolaan pendapatan yang didalamnya termuat sumber pendapatan dan penyusunan regulasi.*
- b) Menurut fungsional perencana mengatakan bahwa, *ada program prioritas yang terdampak ketika kapasitas menurun yaitu pembangunan infrastruktur khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dimana terdampaknya banyak program yang ditunda pelaksanaan atau dibatalkan*
- c) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *ada program prioritas yang terdampak ketika kapasitas menurun yaitu program pengelolaan pendidikan, dimana dalam program tersebut terdapat sub kegiatan untuk pembangunan sekolah yang mana dana APBN telah ditentukan. Ketika kapasitas menurun maka program tersebut bisa ditunda atau dibatalkan.*

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa penurunan kapasitas fiskal daerah berdampak pada program-program prioritas yang beragam. Bapak kabid menjelaskan bahwa

program pengelolaan pendapatan, termasuk sumber pendapatan dan penyusunan regulasi, menjadi salah satu yang terdampak. Fungsional perencana menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU), sering kali mengalami penundaan atau pembatalan.

Sementara itu, fungsional perencana lain menyebut bahwa program pengelolaan pendidikan, seperti pembangunan sekolah yang didanai dari APBN, juga bisa terdampak serupa jika kapasitas fiskal menurun.

4. Apakah ada program atau proyek pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

a) Menurut bapak kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) mengatakan bahwa, *untuk meningkatkan pendapatan daerah terdapat program pembangunan yang di rancang seperti:*

1) *Optimalisasi Pendapatan*

Optimalisasi pendapatan oleh Bapperida tidak hanya melibatkan pemaksimalan potensi sumber pendapatan yang ada, tetapi juga mencakup pengelolaan yang berbasis data, penggunaan teknologi, kebijakan yang mendukung sektor ekonomi lokal, serta diversifikasi sumber pendapatan.

Dengan perencanaan yang tepat dan strategi yang efektif, Bapperida dapat membantu pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

2) *Pemanfaatan aset untuk penerimaan pendapatan*

Pemanfaatan aset untuk penerimaan pendapatan oleh Bapperida adalah strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta, Bapperida dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Menurut fungsional perencana mengatakan bahwa, *untuk meningkatkan pendapatan daerah terdapat program pembangunan yang di rancang yaitu program penelitian dan pengembangan daerah contohnya cosik*

c) Menurut fungsional perencana menyatakan bahwa, *untuk meningkatkan pendapatan daerah terdapat program pembangunan yang di rancang seperti pengembangan pasar untuk pendapatan daerah dan pembangunan dermaga feri penyeberangan untuk masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, berbagai program pembangunan telah dirancang oleh pemerintah daerah. Bapak kabid menyebutkan program optimalisasi pendapatan melalui pengelolaan berbasis data, penggunaan teknologi, kebijakan pendukung ekonomi lokal, serta diversifikasi sumber pendapatan, dan pemanfaatan aset dengan perencanaan matang dan transparan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Fungsional perencana menyoroti pentingnya program penelitian dan pengembangan daerah, seperti COSIK, dalam mendukung peningkatan pendapatan. Sementara itu, fungsional perencana lain menekankan pengembangan pasar sebagai sumber pendapatan daerah dan pembangunan dermaga feri penyeberangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Dalam kondisi fluktuasi kapasitas fiskal, bagaimana Bapperida menyesuaikan rencana pembangunan yang telah disusun agar tetap efektif dan efisien ?

Jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

a) Menurut kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) mengatakan bahwa, *agar rencana pembangunan yang telah disusun tetap efektif dan efisien dalam kondisi fluktuasi kapasitas fiskal daerah, Bapperida menyesuaikannya dengan cara rasionalisasi pendapatan dan rasionalisasi belanja.*

Rasionalisasi pendapatan dan rasionalisasi belanja adalah dua langkah penting dalam manajemen keuangan daerah yang bertujuan untuk memastikan efisien dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah. Kedua

konsep ini terkait erat dengan pengelolaan anggaran yang baik dan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

- b) Menurut fungsional perencana mengatakan bahwa, *agar rencana pembangunan yang telah disusun tetap efektif dan efisien dalam kondisi fluktuasi kapasitas fiskal daerah dapat dilakukan dengan mengurangi target kinerja dan otomatis berpengaruh terhadap target belanja daerah*
- c) Menurut fungsional perencana mengatakan bahwa, *agar rencana pembangunan yang telah disusun tetap efektif dan efisien dalam kondisi fluktuasi kapasitas fiskal daerah dengan menyesuaikan belanja dan menyesuaikan pendapatan asli daerah (PAD).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa, agar rencana pembangunan tetap efektif dan efisien dalam kondisi fluktuasi kapasitas fiskal daerah, berbagai langkah penyesuaian dilakukan. Bapak kabid menyarankan rasionalisasi pendapatan dan belanja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang mendukung tujuan pembangunan daerah.

Fungsional perencana menambahkan bahwa pengurangan target kinerja dan belanja daerah menjadi salah satu cara penyesuaian. Sementara itu, fungsional perencana lain menekankan pentingnya menyesuaikan belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga keberlanjutan rencana pembangunan.

SIMPULAN

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya yang dimilikinya, seperti pajak daerah dan retribusi, guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut. Masalah yang dihadapi adalah kapasitas fiskal daerah yang mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor baik secara internal seperti potensi pendapatan yang hilang akibat regulasi, kemampuan perangkat daerah dalam mengelola pendapatan baik pajak maupun retribusi, dan regulasi pendapatan yang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Faktor eksternal seperti adanya pengaruh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pengelolaan pendapatan, kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang semakin menurun, perubahan regulasi pengelolaan pendapatan daerah dan pengaruh akibat bencana alam yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan pendapatan. Strategi yang dilakukan oleh Bapperida untuk memitigasi dampak fluktuasi kapasitas fiskal daerah adalah penerimaan pendapatan melalui aplikasi, menghitung kembali potensi pendapatan yang tersedia dan menertipkan pengelolaan pendapatan dengan cara penertipan SPPT dan retribusi daerah.

Perencanaan pembangunan adalah proses terstruktur yang berfungsi untuk menentukan dan mengarahkan kebijakan serta tindakan masadepan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kondisi kapasitas fiskal daerah yang menurun terdapat program prioritas yang terdampak yaitu program pengelolaan pendapatan yang didalamnya termuat sumber pendapatan dan penyusunan regulasi. Untuk itu agar perencanaan pembangunan tetap efektif dan efisien maka dilakukannya rasionalisasi pendapatan dan rasionalisasi belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R. W. (1971). A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis (Analyse de l'effort et de la pression fiscale par la methode de regression) (Un estudio del esfuerzo tributario y de la presion fiscal mediante el analisis de regresion). *Staff Papers - International Monetary Fund*, 18(3), 570. <https://doi.org/10.2307/3866315>
- Creswell, J. W. . (2003). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Dan, G., Penanganan, S., Anak, P., Al, U., & Medan, W. (2022). Guru dan Strategi Penanganan Pada Anak Dengan Masalah Emosional di RA. As-Syafiqah 1 Seila Rizkina 4 Wiyana Fitri. *Jurnal Raudhah*, 10(2). <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah>
- Ekonomi Universitas Al Azhar Medan Hal, F., & KAPASITAS FISKAL KABUPATEN LANGKAT Syaifullah, A. (2021). JURNAL BONANZA. In *Jurnal BONANZA* (Vol. 1, Issue 2).
- Henry, A., Pemerintah, S., Dairi, K., Sm Raja, J., 130, N., & Warjio, S. (2014). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PADA

- KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI). In *Public Administration Journal JAP* (Vol. 2, Issue 2).
- Herdiyana Jurnal Pajak dan Keuangan, D., & Herdiyana Politeknik Keuangan Negara STAN, D. (2019). *ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH* (Vol. 1, Issue 1).
- Jalil, A. (n.d.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Sere Wangi Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal GPJER*, 3(2), 2021–2076. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/gpjer>
- Kapasitas Perencanaan Pada Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan, P., Yan Rino, R., Andia Dekrita, Y., & Da Silva, Y. (n.d.). *IMPROVING PLANNING CAPACITY AT THE PLANNING AND RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY (BAPELITBANG) IN AN EFFORT TO REDUCE EXTREME POVERTY IN SIKKA DISTRICT*.